

ABSTRAK

Skripsi dengan judul dengan judul “Tinjauan Maqashid Syariah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Terhadap Praktik Penambangan Pasir Ilegal (Studi Kasus Desa Mlati, Desa Gampeng, dan Desa Juwet Kabupaten Kediri)” ini ditulis oleh Hidayanah Khoeriyah, NIM 126101203205, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang dibimbing oleh Ibu SeptiWulansari S.Sy., M.H.

Kata kunci: *Maqashid Syariah, Hukum Positif, Penambangan Pasir, Ilegal*

Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya aktivitas penambangan pasir ilegal di Desa Mlati, Desa Gampeng, dan Desa Juwet Kabupaten Kediri yang telah menjadi isu krusial, mengingat dampak buruk yang ditimbul dari aktivitas penambangan pasir tersebut dapat dilihat dan dirasakan. Adanya petugas yang melakukan patroli untuk aktivitas ilegal ini bahkan tidak dapat menghentikan tempat penambangan secara permanen.

Fokus penelitian ini adalah (1) Bagaimana praktik penambangan pasir ilegal di Kabupaten Kediri; (2) Bagaimana praktik penambangan pasir ilegal di Kabupaten Kediri ditinjau dari Maqashid Syariah; (3) Bagaimana praktik penambangan pasir ilegal di Kabupaten Kediri ditinjau dari Hukum Positif;

Tujuan Penelitian ini untuk mendeskripsikan praktik penambangan pasir ilegal di Kabupaten Kediri, menganalisis praktik penambangan pasir ilegal di Kabupaten Kediri ditinjau dari Maqashid Syariah dan menganalisis praktik penambangan pasir ilegal di Kabupaten Kediri ditinjau dari Hukum Positif.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Kondensasi data, melakukan pemilihan dan penyederhanaan catatan terhadap data-data yang telah diperoleh kemudian merangkumnya yang dinilai sebagai inti pembahasan ? (2) Analisis data, menganalisis data yang meliputi fokus penelitian dan penyusunan temuan yakni informasi, situasi, dan dokumentasi ? (3) Penarikan kesimpulan, menyusun kesimpulan yang telah diverifikasi selama kegiatan berlangsung atau meninjau kembali catatan lapangan yang telah ada ?

Hasil penelitian: (1) Praktik penambangan pasir ilegal khususnya di Desa Mlati, Desa Gampeng, dan Desa Juwet ini masih terus dilakukan karena tingginya akan permintaan pasir untuk bahan industri karena pasir sungai brantas ini dianggap memiliki kualitas yang baik, tingginya permintaan akan pasir ini menjadikan pendapatan yang diperoleh cepat dan relatif tinggi dan juga aktivitas ini merupakan mata pencaharian mereka satu-satunya yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun lamanya. Ketersediaan pasir yang mudah diakses juga menjadi faktor dilakukannya aktivitas ilegal ini terus-menerus. Bahkan para penambang tidak segan-segan untuk melakukan aktivitas penambangan di malam hari, hal ini dilakukan untuk menghindari petugas penertiban, dan juga masyarakat

yang tinggal pada desa-desa tersebut cenderung hanya diam dan tidak berani ikut campur hal ini dikarenakan untuk menghindari konflik dengan penambang. Pada Desa Mlati ini juga pernah adanya penjatuhan sanksi pidana dan denda oleh pemilik usaha penambangan, serta adanya penangkapan dan penyitaan kepada para penambang ilegal. Selain itu, pada Desa Mlati, Desa Gampeng dan Desa Juwet menjadikan bantaran sungai sebagai sarana jalan, kedalaman sungai diluar batas minimum dan juga penggunaan alat menambang yang tidak dibatasi jumlahnya;

(2) Berdasarkan tinjauan Maqashid Syariah pada Desa Mlati ini, pertama *Hifdzu Al-Mal* yaitu menjaga harta, dalam kegiatan penambangan pada desa ini tidak sesuai dengan konsep menjaga harta dikarenakan dalam aktivitas penambang ini dilakukan dengan upaya mencari rezeki melalui cara yang tidak sah dan melanggar hukum islam, Kedua *Hifdzu An-Nasl* menjaga keturunan, dalam hal ini tidak sesuai dikarenakan dampak buruk yang ditimbulkan yaitu kerusakan ekosistem sungai sudah dirasakan masyarakat dan dapat mengganggu perkembangan generasi mendatang. Sedangkan pada Desa Gampeng dan Juwet pertama *Hifdzu Al-Mal* yaitu menjaga harta, dalam kegiatan penambangan pada desa ini juga tidak sesuai dengan konsep menjaga harta dikarenakan dalam aktivitas penambang ini dilakukan dengan upaya mencari rezeki melalui cara yang tidak sah dan melanggar hukum islam mereka mengesampingkan apakah tindakan ini legal ataupun ilegal dikarenakan keuntungan yang didapat dari aktivitas ini, Kedua *Hifdzu An-Nasl* menjaga keturunan, dalam hal ini tidak sesuai dikarenakan dampak buruk yang ditimbulkan yaitu kerusakan ekosistem sungai dan berkurangnya populasi ikan sudah dirasakan masyarakat dan dapat mengganggu perkembangan generasi mendatang. Ketiga *Hifdzu An-Nafs* menjaga jiwa, pada desa tersebut tidak sesuai dengan menjaga jiwa dalam bentuk keselamatan karena kerusakan jalan yang ditimbulkan mengganggu ketenangan dan keselamatan bagi masyarakat;

(3) Berdasarkan tinjauan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 pada Desa Mlati melanggar ketentuan Perda No 1 Tahun 2005 Pasal 15 ayat 3 terkait dengan jumlah peralatan harus dibatasi jumlahnya. Sedangkan pada Desa Gampeng melanggar ketentuan pada Pasal 15 ayat 1 huruf b terkait larangan adanya penggerusan tanah pada area penambangan. Ketentuan lain yang dilanggar pada Desa Mlati, Desa Gampeng, dan Desa Juwet pada Pasal 16 ayat 3 terkait larangan menggunakan bantaran sungai dan tanggul sebagai sarana jalan, dan melanggar Pasal 15 ayat 1 huruf d terkait kedalaman sungai tidak boleh melebihi batas minimum perisan.

ABSTRACT

The undergraduate thesis entitled “A Review of Maqashid Sharia and Regional Regulation of East Java Province Number 1 Years 2005 (Case study of Mlati, Gampeng, and Juwet Village in Kediri Regency)” was written by Hidayanah Khoeriyah, Student Identification Number (NIM) 126101203205, from the Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, State Islamic University (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, under the supervision of Mrs. Septi Wulansari, S.Sy., M.H.

Keywords: Maqashid Sharia, Positive Law, Sand Mining, Illegal

This research was motivated by the prevalence of illegal sand mining activities in Kediri Regency, which has become a critical issue due to the negative impacts resulting from such activities. The Public Order Agency (Satpol PP) of Kediri Regency has issued warnings and provided education to the sand miners. However, these efforts have not prevented the continuation of illegal mining activities.

The focus of this research includes: (1) How are illegal sand mining practices carried out in Kediri Regency? (2) How are illegal sand mining practices in Kediri Regency reviewed from the perspective of Maqashid Sharia? (3) How are illegal sand mining practices in Kediri Regency reviewed based on Positive Law?

The purpose of this research is to describe the illegal sand mining practices in Kediri Regency, analyze these practices from the perspective of Maqashid Sharia, and review them based on Positive Law.

This research is categorized as field research, with data collection methods including interviews, observation, and documentation. The data analysis techniques used are as follows: (1) Data condensation, which involves selecting and simplifying the collected data to highlight the main points relevant to the research discussion. (2) Data analysis, focusing on the research objectives and compiling findings, including information, situations, and documentation. (3) Drawing conclusions, which involves verifying findings during the research process and reviewing field notes.

The results of this research are as follows: (1) Illegal sand mining practices: These activities, particularly in Mlati Village, Gampeng Village, and Juwet Village, are conducted to meet the miners' livelihood needs, as sand mining serves as their primary source of income. In Mlati Village, criminal and administrative sanctions have been imposed on sand mining business owners, and arrests and confiscations have been carried out on illegal miners. Similarly, in Gampeng Village, warnings and confiscations were issued. In Juwet Village, despite warnings, illegal mining activities have resumed due to inadequate supervision; (2) From the perspective of Maqashid Sharia: In Mlati to In mlati village, it is not in accordance with Hifdzu An-Nasl to protect offspring, Hifdzu Al-Mal to protect property. Meanwhile, gampeng village and juwet village are not in accordance with Hifdzu Al-mal to protect wealth, Hifdzu An-Nasl to protect offspring, Hifdzu

An-Nafs to protect the soul; (3) Based on a review of Regional Regulation No. 1 of 2005, Mlati Village violates the provisions of Regional Regulation No. 1 of 2005 Article 15 paragraph 3 related to the number of equipment must be limited. Meanwhile, Gampeng Village violates the provisions in Article 15 paragraph 1 letter b related to the prohibition of soil erosion in the mining area. Other provisions violated in Mlati Village, Gampeng Village, and Juwet Village in Article 16 paragraph 3 related to the prohibition of using riverbanks and embankments as road facilities, and violating Article 15 paragraph 1 letter d related to the depth of the river should not exceed the minimum threshold.

الملخص

عنوان البحث: "دراسة مقاصد الشريعة والقانون الوضعي عن ممارسة تعدين الرمال غير القانونية في كديري"، كُتبتْها هديانة خيرية، الرقم الجامعي (126101203205)، برنامج دراسات القانون المعاملة الشرعية، كلية الشريعة والقانون، جامعة سيّد علي رحمة الله الإسلامية الحكومية تولونج أنجونج، بإشراف السيدة سبتي وولانساري، بكالوريوس الشريعة، ماجستير في القانون.

الكلمات المفتاحية: مقاصد الشريعة، القانون الوضعي، تعدين الرمال، غير قانوني

تستند هذه الدراسة إلى انتشار تعدين الرمال غير القانونية في كديري، التي أصبحت قضية اهمية نظرا إلى التأثيرات السلبية الناشئة عن هذه الأنشطة. قدمت هيئة النظام العام عن وحدة الشرطة المدنية (ساتبول بي بي) من كديري تحذيرات وتوجيهات للعمال في تعدين الرمال. مع ان ذلك لم يمنع استمرار الأنشطة غير القانونية.

محاور البحث (1) كيف تُمارس تعدين الرمال غير القانونية في كديري؟ (2) كيف يتم تحليل تعدين الرمال غير القانونية في كديري في منظور مقاصد الشريعة؟ (3) كيف يتم تعدين الرمال غير القانونية في كديري في القانون الوضعي؟

أهداف البحث: (1) وصف ممارسات تعدين الرمال غير القانونية في كديري. (2) تحليل ممارسات تعدين الرمال غير القانونية في منظور مقاصد الشريعة. (3) مراجعة هذه الممارسات بناءً على القانون الوضعي.

منهج البحث: هذه الدراسة تُعد بحثًا ميدانيًا، استخدمت فيها طرق جمع البيانات مثل المقابلات والملاحظة والتوثيق. أما تقنيات تحليل البيانات فتشمل: (1) اختزال البيانات: اختيار وتبسيط البيانات المجمعة لتلخيص النقاط الأساسية ذات الصلة بمناقشة البحث. (2) تحليل البيانات: التركيز على محاور البحث وصياغة النتائج التي تتضمن المعلومات والأوضاع والوثائق. (3) استخلاص النتائج: التحقق من النتائج أثناء العملية البحثية ومراجعة الملاحظات الميدانية.

نتائج البحث: (1) ممارسات تعدين الرمال غير القانونية: تُمارس هذه الأنشطة خاصة في قرى ملاتي وغمبنغ وجويت لفعل احتياجات العمال المعيشية، حيث تعتبر هذا العمل مجرد مصدر رزقهم. اما في قرية ملاتي، يكون فرض عقوبات جنائية وإدارية على أصحاب أعمال التعدين، و القبض على العمال غير القانونيين مع مصادرة معداتهم. أما في قرية غمبنغ، فقد صدرت تحذيرات و مصادرة للمعدات. كنه في قرية جويت، لكن عادتهم غير القانونية تجري بسبب ضعف الرقابة. (2) في منظور مقاصد الشريعة: التعدين قرية ملاتي، موافق على حفظ الدين (حفظ الدين) وحفظ النسل (حفظ النسل)، حيث يسعى العمال إلى توفير الرزق والاحتياجات الأساسية والثانوية لأسرهم. كما يحافظ على حفظ النفس (حفظ النفس) من خلال جمع الأموال لإصلاح الطرق. (3) اما التعدين على القانون الوضعي قانون رقم 1 سنة 2005 في قرية ملاتي يكون بفرض عقوبات جنائية على عمال تعدين الرمال. وشملت العقوبات السجن في ست اشهر و ضياع مال الى 2 مليون روبية. وفيها قبض ستة و عشرون عمالا مع اخذ الات تعدين الرمال. اما تعدين الرمال في غمبنغ يكفي بتوجيه تحذيرات و مصادر الات تعدين الرمال. ويكفي التعدين في قرية جويت، بتوجيه تحذيرات لعمال تعدين الرمال فقط.